

# **Akses Penduduk Miskin terhadap Kebutuhan Dasar**

**Editor | Tukiran, Agus Joko Pitoyo,  
Pande Made Kutanegara**



**Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan  
Universitas Gadjah Mada**

# Pekerja Anak dan Kemiskinan dalam Perspektif Ilmu Sosial

*Ben White*

## Pendahuluan

Anak-anak yang bekerja acap kali mengalami diskriminasi dalam hubungan kerja. Persoalan ini sebenarnya juga dialami oleh berbagai kelompok sosial yang lain, seperti perempuan, migran, kelompok minoritas, dan orang cacat. Namun hanya dalam kasus anak, intervensi untuk mengatasi persoalan itu lebih dimaksudkan untuk melindungi mereka dari kerja itu sendiri ketimbang melindungi mereka dalam hubungan kerja dan memperjuangkan hak-hak mereka sebagai pekerja (White, 1994). Mengapa situasi dan masalah anak yang bekerja dianggap berbeda dengan situasi kerja orang dewasa? Apakah pemikiran ini merefleksikan gagasan tertentu tentang *childhood* itu sendiri, yang bersifat gagasan faktual - apakah anak itu?, *what is a child?* -atau gagasan normatif - apakah masa kanak yang baik itu?, *what is a good childhood?*

Secara tersirat maupun tersurat, setiap titik pijak kebijakan tentang keterlibatan anak dan remaja dalam dunia kerja didasarkan pada suatu model atau teori tentang *childhood* serta kedudukan kerja dalam hidup dan perkembangan anak (Myers, 2001). Penelitian ilmu sosial yang baik tentang isu-isu ini berfungsi lebih daripada sekadar mengumpulkan fakta dengan mempertanyakan gagasan, model, dan stereotipe yang berlaku, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang situasi,

tren, dan masalah yang selanjutnya dapat menjadi pijakan aksi. Sebagai peneliti, kita perlu mengambil sejumlah langkah seperti berikut. *Pertama*, mendokumentasikan proses ketika kenyataan hidup dan pengalaman kerja anak dan remaja melenceng dari persepsi awam dan model normatif. *Kedua*, membongkar gagasan dan asumsi yang mendasari persepsi dan model tersebut. *Ketiga*, mengembangkan seperangkat konsep kunci guna mendapatkan analisis yang lebih realistis sehingga dapat mengantarkan kita pada langkah *keempat*, yaitu kejelasan titik pijak atau posisi yang menghubungkan teori dengan praktik. Keempat langkah ini, yang dapat disarikan sebagai “kritik”, “dekonstruksi”, “kerja teoretis”, dan “titik pijak” (Mayall, 2001: 249-53), adalah medan kerja penelitian sosiologi dan antropologi (selanjutnya disebut dengan “ilmu sosial”) yang telah, atau dapat, memberikan sumbangan penting.

Apakah yang dapat diungkapkan oleh ilmu sosial tentang keragaman kerja anak dan hubungan kerja yang terjadi di masyarakat tertentu dan antarmasyarakat dari waktu ke waktu? Apa yang dapat dijelaskannya tentang dimensi gender di dalam pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak? Tentang kerentanan dan ketahanan anak-anak yang bekerja? Tentang faktor-faktor yang menentukan mana pekerjaan yang berbahaya dan mana yang tidak? Tentang kecocokan atau ketidakcocokan kerja dan sekolah? Tentang pandangan anak-anak sendiri terhadap persoalan ini? Pada bagian pertama bab ini, kita akan menyarikan hasil studi antropologi terbaru tentang kerja anak yang memudahkan kita memahami fenomena tersebut dalam perspektif historis dan komparatif. Selanjutnya, kita akan mempraktikkan sebagian gagasan tersebut dalam kasus Indonesia, dalam bentuk uraian ringkas tentang dinamika sejarah kerja anak dalam konteks perubahan *childhood* Indonesia, dari

masa kolonial hingga kekinian. Bab ini akan diakhiri dengan sejumlah prinsip umum yang diharapkan dapat menjadi dasar aksi.

## **Pekerja Anak dalam Perspektif Sejarah dan Komparatif**

Dari warisan karya etnografi yang sekarang tersedia, kita mendapatkan pengetahuan komparatif tentang kerja anak di berbagai masyarakat. Beberapa kompilasi studi menawarkan pandangan komparatif yang bagus dalam konteks kerja-kerja anak yang problematik yang menjadi perhatian legislasi dan intervensi tentang buruh anak. Namun kita jarang menemukan studi yang fungsinya lebih daripada sekadar mengumpulkan fakta dengan menyelami bagaimana pekerjaan itu dialami/dipahami oleh anak-anak itu sendiri (White, 1982; Miljeteig, White, Williams, 1999; Lieten & White, 2001; Schlemmer, 2000; Hungerland, et.al. 2007). Karya etnografi tentang “bentuk-bentuk pekerjaan anak yang paling buruk” (untuk meminjam istilah ILO) jarang ditemukan; studi yang berfokus pada anak-anak pelacur di Thailand yang dilakukan oleh Montgomery (2001) merupakan pengecualian.

### **1. Mendefinisikan *Childhood* dalam Hubungannya dengan Bekerja dan Eksploitasi**

Tidak ada definisi universal tentang “anak” dan perspektif ilmu sosial cenderung kian menambah kerumitan ketimbang memberikan jawaban siap pakai. Sebagian besar definisi formal dan legal menggunakan pembedaan sederhana berbasis umur biologis, misalnya sebagian besar definisi PBB menjelaskan anak-anak sebagai mereka yang berada dalam kelompok umur 0-17

tahun. Namun usia kronologis tidak diterima secara universal sebagai dasar untuk menentukan siapa yang termasuk/tidak termasuk sebagai anak, atau siapa yang seharusnya/tidak seharusnya diperlakukan sebagai anak. Di mana pun batas itu ditetapkan, perbedaan berbasis umur yang bersifat dikotomis antara “anak” (bukan orang dewasa) dan “orang dewasa” (bukan anak-anak) menutup mata terhadap realitas pertumbuhan. Seorang “anak” berumur 17 tahun mempunyai lebih banyak persamaan dengan orang dewasa umur 18 (atau 25) tahun ketimbang dengan anak berumur 8 tahun. Persoalan serupa juga mengemuka ketika muncul ikhtiar untuk menentang *child work* yang tidak berbahaya dan *child labour* yang bahaya. Kategorisasi yang bersifat dikotomis (*either/or*) menyodorkan oposisi biner artifisial tentang fenomena yang dalam realitasnya merupakan *continua* dan pada akhirnya menjerumuskan kita pada kebijakan dan analisis yang tidak tepat (White, t.t; O’Connell Davidson, 2005; Bourdillon, 2006).

Pada dua dasawarsa terakhir, semua gagasan *childhood* yang diberlakukan secara universal mendapatkan banyak kritik tajam. Kebergantungan anak-anak sebagian hanyalah merupakan fenomena alamiah serta urutan dan masa perkembangan kompetensi tertentu sangat bergantung pada konteks budaya (Rogoff, 2003). Studi sosial baru tentang *childhood* turut membentuk cara pikir kita tentang kerja dan pembelajaran dalam kehidupan anak. Secara khusus, gagasan yang menyatakan anak dan remaja merupakan konstruksi sosial atau kultural, buah pikiran yang sudah menjadi standar dalam antropologi sejak kritik awal Margaret Mead terhadap teori Hall tentang *adolescence*, dianggap sebagai titik penting munculnya pendekatan baru dalam sosiologi anak-anak (James & Prout, 1997; James & James, 2004). Wawasan teoretis penting tentang

*childhood* diberikan oleh karya mutakhir tentang *childhood* sebagai generasi dan hubungan generasional (Alanen & Mayall, 2001) dan karya Liebel (2004) yang mengupas “teori berorientasi subjek” tentang anak-anak yang bekerja.

## 2. Keragaman dan Hubungan Kerja Anak

Kerja telah senantiasa menjadi bagian hidup dari sebagian besar anak-anak di seluruh dunia. Akan tetapi, perbandingan antarmasyarakat dan antarwaktu menunjukkan tingginya keragaman dalam hal karakter dan intensitas kerja anak, konteks dan hubungan ketika kerja tersebut dipraktikkan, serta persepsi sosial dan penilaian terhadap kerja anak. Penelitian ilmu sosial merupakan sumber penting untuk memahami keragaman ini.

Kerja anak di dunia modern tidak sepatutnya dipahami sebagai peninggalan masa primitif, yang ditakdirkan akan menghilang seiring dengan modernisasi dan pembangunan ekonomi. Karya arkeologi dan studi kontemporer tentang masyarakat berburu-meramu menunjukkan sebagian besar masyarakat prapertanian relatif efisien mengatur rasio *output* makanan dengan *input* energi manusia. Tak seorang pun (baik dewasa maupun anak-anak, laki-laki maupun perempuan) bekerja sekeras dalam masyarakat pertanian, sedangkan anak-anak relatif tidak banyak memainkan peran penting dalam aktivitas ekonomi hingga mereka beranjak usia belasan tahun. Dengan perkembangan pertanian, yang pertama kali muncul sekitar 10.000 tahun lalu, kerja menjadi bagian dari definisi kultural tentang anak.

“Perubahan paling mencolok yang dimunculkan oleh pertanian adalah pentingnya penggunaan (tenaga) anak dalam kerja. Definisi inti *childhood* di sebagian besar masyarakat pertanian jauh lebih banyak mengandalkan

dimensi kerja-kerja produktif (*useful work*) ketimbang di masyarakat berburu dan meramu [...] kerja produktif itu juga menyisipkan ketegangan yang lebih nyata ke dalam dunia anak-anak masyarakat pertanian ketimbang yang pernah terjadi di masyarakat berburu dan meramu. Guna mendapatkan nilai penuh dari tenaga kerja anak, keluarga harus membekap jasa anak-anak hingga usia mereka mencapai pertengahan hingga akhir belasan tahun” (Stearns, 2006: 11, 13).

Banyak karakter *childhood* kontemporer mencerminkan warisan ribuan tahun lampau saat pertanian merupakan aktivitas utama mayoritas masyarakat dunia, dan rumah tangga pertanian menjadi latar perkembangan sebagian besar anak-anak. Hal ini terlihat, misalnya, dari kalender sekolah barat modern. Masa liburan panjang pada musim semi dan musim panas di wilayah utara bukanlah mencerminkan nikmatnya berlibur di bawah cuaca yang menyenangkan, melainkan kebutuhan (pada masa dulu) terhadap tenaga anak untuk membantu musim tanam dan panen di masa-masa puncak pertanian. Hal ini juga ditunjukkan oleh sifat dasar hubungan intrarumah tangga. Meskipun perbedaan gender juga terdapat dalam masyarakat berburu dan meramu, perbedaan status berbasis gender antara laki-laki dan perempuan di masyarakat ini bersifat terbatas. Belakangan, tuntutan kerja pertanian mendorong munculnya sistem perbedaan gender yang baru di kalangan anak-anak. Masyarakat pertanian umumnya bergerak menuju patriarki dalam hal hubungan antargenerasi maupun gender. Kebutuhan orang tua untuk mengontrol waktu anak-anaknya ditunjukkan dalam bentuk disiplin yang keras dan tekanan kultural untuk menghormati generasi tua, yang lazim ditemukan di masyarakat petani di seluruh dunia (Stearns, 2006).

Dewasa ini, perhatian dan kepedulian di lingkaran kebijakan dan politik banyak ditujukan untuk mengkritisi perekrutan tenaga kerja anak dalam rantai suplai manufaktur berorientasi ekspor. Namun dilihat dari jumlah anak yang dipekerjakan, rantai suplai manufaktur ini sendiri sebenarnya hanya mempekerjakan sejumlah kecil anak di seluruh dunia. Bentuk pekerjaan yang paling lazim melibatkan anak-anak di negara-negara berkembang tetap berupa kerja tak berupah di usaha tani kecil atau usaha keluarga lainnya. Berbagai studi tentang penggunaan waktu di rumah tangga petani yang dilakukan oleh antropolog menunjukkan anak-anak terkadang memberikan kontribusi separuh lebih dari seluruh jam tenaga produktif di rumah tangga (Reynolds, 1991; White, 1982). Meski perkembangan ekonomi dan meluasnya pendidikan telah mengakhiri penggunaan tenaga kerja anak penuh waktu di sebagian negara, hal itu tidak sepenuhnya memisahkan anak dari dunia kerja, atau dari pasar tenaga kerja. Mayoritas anak-anak di negara-negara maju, seperti Inggris, Belanda, dan USA, memiliki pengalaman terlibat secara reguler dalam pasar tenaga kerja paruh waktu atau musiman sebelum mereka menginjak usia 16 tahun.

### 3. Konteks dan Hubungan Kerja

Dengan pengecualian beberapa contoh klasik, seperti tenaga kerja anak di awal revolusi industri di sebagian Eropa dan Amerika Utara, kontribusi kerja anak pada proses reproduksi sosial dan penciptaan nilai relatif terabaikan. Ikhtiar untuk membangun tipologi kerja anak yang membedakan kategori-kategori yang paling penting membutuhkan elaborasi lebih lanjut. Tipologi yang sistematis akan membantu kita menempatkan situasi dan hubungan kerja bukan hanya

berdasarkan sektor ekonomi (pertanian, kerajinan, perdagangan, manufaktur, jasa) dan kerja berupah atau tidak berupah, melainkan juga seharusnya mencakup bentuk rekrutmen (bebas atau tidak bebas) dan pembayaran (berdasarkan waktu atau jumlah output yang dihasilkan), lokasi (di rumah atau jauh dari rumah), dan status (pembantu yang bergantung atau pelaku otonom).

Seperti halnya orang dewasa, pekerja anak secara historis telah terlibat dalam beragam hubungan kerja dan sistem tenaga kerja (*labour regimes*). Keragaman ini mulai dari berbagai bentuk hubungan kerja yang bersifat tidak bebas (perbudakan, kerja rodi, ijon kerja, kuli kontrak) hingga produksi komoditas kecil berbasis keluarga dan kerja upahan. Dalam produksi tanaman ekspor masa kolonial, anak-anak terlibat bekerja di berbagai jenis kerja upahan. Meski keterlibatan anak-anak ini jelas bersifat eksploitatif, ada bukti bahwa anak-anak sendiri acap kali lebih memilih bekerja sebagai buruh upahan ketimbang sebagai pembantu tak diupah di usaha tani keluarga yang bersifat patriarki atau di usaha-usaha keluarga lainnya (Grier, 2006; White, 2004). Sebagai contoh untuk otonomi relatif, banyak anak menganggapnya sebagai suatu kebanggaan apabila mereka memiliki petak tanah pertanian atau ternak sendiri (Reynolds, 1991; Liebel, 2004).

Meskipun kontribusi kerja anak dalam keluarga acap kali dilihat sebagai bagian dari "strategi bertahan hidup" (*survival strategy*) rumah tangga, akses pada tenaga kerja perempuan, anak laki-laki, dan anak perempuan yang tak diupah juga merupakan langkah awal menuju ekspansi dan akumulasi di perusahaan berskala kecil. Proses ini sendiri lazim dikenal sebagai *endo-familial accumulation* (akumulasi di dalam keluarga), yang jika berhasil, akan diikuti dengan perekrutan

tenaga luar yang digaji dan penarikan secara bertahap anggota keluarga dari beban kerja.

Baik sebelum dan sesudah pengenalan sistem pendidikan formal, kerja telah menjadi sarana penting untuk pembelajaran dan persiapan untuk mengemban tanggung jawab penghidupan sebagai orang dewasa. Hal ini terutama berlaku dalam kasus pertanian, kerajinan, dan perdagangan yang berbasis keluarga. Di banyak usaha perdagangan dan kerajinan yang secara tradisional didominasi laki-laki, pembelajaran berbasis kerja diatur melalui institusi magang (*apprenticeship*). Magang ini terkadang berbasis pada adat, tak jarang berbasis pada aturan dan hambatan masuk yang ketat dan diatur oleh perkumpulan atau asosiasi profesional, serta terkadang diatur dan dipromosikan oleh negara modern. Dalam kondisi-kondisi tertentu, pembelajaran berbasis kerja ini menjadi semacam *pseudo-apprenticeship* ketika pekerja muda direkrut bergantian berbasis kontrak magang dengan upah di bawah rata-rata—acap kali justru setelah membayar sejumlah uang agar dapat diterima masuk pertama kali—lama setelah mereka menguasai keahlian yang diperlukan (Morice, 1982; Marguerat, 2000; Garet, 2000).

Kerja anak-anak tak luput dari bias gender, tetapi di banyak masyarakat, pemilahan gender biasanya lebih kabur di kalangan anak-anak ketimbang di kalangan orang dewasa. Bentuk kerja yang dilakukan anak-anak yang paling sering diabaikan di banyak masyarakat, baik yang miskin maupun yang makmur, biasanya adalah kerja domestik dan kerja-kerja yang berhubungan dengan perawatan (*domestic and caring work*). Tugas rumah tangga dan perawatan untuk orang lanjut usia dan anggota keluarga yang sakit tak jarang diserahkan pada anak-anak, termasuk pada mereka yang bersekolah (Robson,

2000). Di masa lampau maupun sekarang, kerja-kerja domestik berupah di daerah urban juga menjadi salah satu tujuan paling umum para migran anak-anak (Bourdillon, 2006b; Camacho, 1999; Jacquemin, 2004).

#### 4. Bekerja dan Sekolah

Selain menghapus bentuk-bentuk kerja anak yang paling ekstrim atau paling buruk (yang melibatkan minoritas kecil anak-anak dunia), kebijakan sosial terkait pekerja anak selalu memiliki tujuan lain yang melibatkan jauh lebih banyak anak, yaitu mendorong pergeseran historis dari kerja ke sekolah sebagai aktivitas utama anak-anak. Pergeseran ini baru muncul menjadi isu kebijakan setelah diberlakukannya sistem pendidikan formal serta ketika negara dan konsensus sosial mengakui hak anak atas pendidikan. Hubungan antara kerja dan pendidikan kemudian menjadi topik sentral dalam perdebatan hangat dan sengit tentang kerja anak, terutama oleh kedua kelompok berikut. Kelompok "abolisionis" menekankan ketidakcocokan kerja dan sekolah di kalangan anak-anak usia sekolah, sedangkan kelompok "regulasionis" berpendapat kerja (yang diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu pendidikan) tepat memiliki tempat yang layak dalam kehidupan anak-anak usia sekolah. Ilmu sosial sangat berpotensi memberikan kontribusi pada perdebatan ini.

Bersekolah sendiri merupakan suatu bentuk "kerja", seperti yang dinyatakan oleh banyak sosiolog (Qvortrup, 1995; 2001). Hingga baru-baru ini, kombinasi sekolah-kerja secara aktif dipromosikan oleh berbagai lembaga PBB dan tidak jelas kenapa kombinasi ini diam-diam ditinggalkan sekitar seperempat abad lalu (Myers, 2001b). Di negara-negara kaya, beberapa studi sosiologi telah menggali pelbagai implikasi fenomena kombinasi

kerja-sekolah yang sudah dipraktikkan secara luas (McKechnie & Hobbs, 2001; Howieson, McKechnie, Semple, 2006). Di USA, yang hampir semua remajanya terlibat dalam kerja berupah paruh waktu sembari bersekolah, sebuah studi panel dilakukan untuk mengikuti pengalaman beberapa ribu remaja sebagai sampelnya selama lebih dari 15 tahun hingga mereka dewasa (Mortimer, 2003). Temuan studi tersebut menggugat pandangan konvensional; antara lain, studi itu menemukan kerja (termasuk kerja intensif sekali pun) secara signifikan memengaruhi alokasi waktu untuk tugas sekolah atau prestasi sekolah dan anak-anak sekolah (laki-laki maupun perempuan) yang memiliki pekerjaan rutin ternyata cenderung lebih cepat beradaptasi dengan kerja berorientasi karier di masa dewasanya. Sayangnya, tak ada studi sejenis yang didapatkan dalam konteks negara berkembang. Satu studi penting perihal perspektif anak-anak tentang kehidupan kerja mereka sendiri di Bangladesh, Ethiopia, Filipina, dan Amerika Tengah menunjukkan anak-anak yang bekerja di semua wilayah tersebut lebih memilih menggabungkan kerja dengan sekolah, serta sama sekali tidak melihat kerja dan sekolah sebagai pilihan yang saling bertentangan (Woodhead, 1999; 2001).

#### 5. Pekerja Anak sebagai Objek, Subjek, dan Pelaku

Meskipun sekarang kita telah terbiasa memandang anak sebagai "subjek legal" dalam pengertian mereka memiliki dan dapat mengklaim hak mereka sendiri, beberapa tahun belakangan ini banyak ilmuwan sosial berpendapat pandangan barat tentang *childhood* cenderung mereduksi anak-anak pada status objek ketimbang subjek sosial. Reduksi itu terjadi lewat peminggiran mereka secara struktural dari wilayah kerja atau produksi nilai yang relevan secara sosial (Nieuwenhuys, 1996;

1999). Gagasan serupa dapat ditemukan dalam pemikiran Zelizer (1985) tentang anak di masyarakat kelas menengah barat yang “tak ternilai” secara emosional dan “tak berguna” secara ekonomis. Dalam pandangan barat ini, nilai anak tidak dilihat dari aktivitas anak, tetapi dari status anak sebagai objek afeksi.

Penelitian ilmu sosial dalam dua dasawarsa terakhir mendukung pandangan berikut. Anak dipandang sebagai pelaku yang mampu berpartisipasi secara efektif dalam perkembangan sosial dan ekonomi mereka sendiri, serta mengejawantahkan “tanggung jawab, ketahanan, dan kemampuan yang luar biasa seperti yang dimiliki orang dewasa” (Moore, 1999: 544).

Agensi si individu selalu dibatasi oleh struktur dan kekuatan yang lebih besar. Sekalipun masuk dalam praktik penggunaan tenaga kerja anak yang didefinisikan oleh dunia internasional sebagai “praktik buruk”, anak-anak sering kali menggunakan agensi dan melibatkan diri mereka sendiri dalam negosiasi dan pembuatan keputusan. Hal ini, misalnya, telah ditunjukkan oleh penelitian mutakhir tentang fenomena migrasi anak yang dilakukan secara independen (Iversen, 2002; Camacho, 1999; Thorsen, 2006), termasuk migrasi ke dalam pekerjaan seks komersial (O’Connell Davidson, 2005; Montgomery, 2001), yang kesemuanya secara otomatis didefinisikan sebagai *child trafficking* dalam protokol internasional jika sang migran berumur di bawah 18 tahun.

Selama dua dasawarsa terakhir, kita menyaksikan konvergensi antara diskursus akademis dan politik tentang *childhood*. Gagasan tentang anak sebagai subjek sosial secara tersirat muncul dalam gagasan tentang hak anak sebagai hak asasi manusia. Dalam pengertian itu, hak-hak tersebut melampaui hak atas perlindungan dan jaminan serta memasukkan hak untuk

berpartisipasi sebagaimana dijelaskan dalam Konvensi PBB 1989 tentang Hak-Hak Anak (CRC). Oleh karena itu, kita perlu memahami anak-anak, termasuk anak-anak yang bekerja, sebagai “manusia utuh” dan bukan “penggalan manusia” dengan kompetensi terbatas yang beranjak dewasa. Penting kiranya memahami mereka sebagai anggota masyarakat, yang hidup di dalam struktur sosial tertentu, sebagai manusia dengan hak dan kewajiban tertentu, memiliki hubungan generasional yang spesifik dengan orang dewasa, dan dicirikan oleh beragam derajat subordinasi. Kita perlu memahami anak-anak sebagai kelompok sosial yang sangat heterogen dan memiliki perbedaan berdasarkan kelas sosial, gender, etnisitas, dan usia.

Pemahaman tersebut pada akhirnya membawa perubahan pada cara pikir kita tentang kerja anak. Perbedaan “anak-orang dewasa” yang bersifat dikotomis dan simplistik perlu dihindari; begitu pula pemilahan simplistik antara kerja anak yang “baik” dengan yang “buruk”. Standar internasional memiliki peran penting, namun standar tersebut tidak seharusnya diberlakukan sebagai model *global childhood* yang tunggal, quasi-universal, yang menganggap semua yang melenceng dari model tersebut sebagai penyakit (Boyden, 1997). Kita juga perlu belajar mendengarkan anak-anak. Banyak anak di belahan utara melihat peminggiran mereka dari kerja yang relevan secara sosial sebagai lanjutan dari ketergantungan yang mengada-ada, artifisial, dan patut dipertanyakan (Liebel, 2004: 276f).

### **Anak yang Bekerja dalam Sejarah Indonesia**

Meskipun pelbagai aspek dari anak-anak Indonesia semasa kolonial terkadang disebut dalam karya-karya sejarawan sosial dan ekonomi (bersama-sama dengan kerja perempuan), belum



pernah ada studi sejarah tentang anak-anak Indonesia yang didasarkan pada sumber-sumber primer. Hal ini menyulitkan kita untuk melakukan perbandingan dengan negara dan wilayah lain. Namun bukti-bukti yang ada menunjukkan kendati anak-anak sudah direkrut sebagai pekerja dalam produksi ekspor pada zaman kolonial, peran pekerja anak tersebut tidak sepenting yang ditunjukkan oleh para sejarawan di negara-negara kolonial Afrika.

### 1. Anak yang Bekerja pada Abad 19

Sebelum Perang Dunia Pertama, penggunaan tenaga kerja anak belum dianggap sebagai isu sosial di Hindia Belanda. Saat itu penggunaan tenaga kerja anak (termasuk kerja upahan) masih belum diatur, dianggap sebagai faktor yang menguntungkan, dan tidak terpengaruh oleh perkembangan internasional. Memang pada saat bersamaan di negeri Belanda tengah muncul kepedulian sosial dan perundang-undangan dalam persoalan serupa.

Dengan mengacu laporan para pejabat lokal sejak awal abad 19, kita dapat melihat anak-anak terlibat dalam kerja produktif sejak usia dini, tak jarang mulai dari usia lima atau enam tahun. Mereka terlibat dalam kerja-kerja pertanian, mengawasi sawah dari burung dan hama lain, serta merawat ternak dan tugas-tugas rumah tangga. Menjelang usia belasan, waktu mereka sudah sepenuhnya terserap untuk kerja-kerja tersebut. Beban pajak yang harus dipikul petani sama-sama mendorong tingginya permintaan tenaga kerja di rumah tangga yang memiliki tanah maupun yang tak bertanah sehingga sumbangan kerja anak-anak menjadi dimensi penting pertahanan rumah tangga (Elson, 1994).

Sebagai syarat mendapatkan lahan untuk tanaman mereka sendiri, para petani diwajibkan oleh sistem tanam paksa yang diperkenalkan tahun 1830 untuk menyediakan sebagian tanah atau tenaga mereka guna penanaman tanaman ekspor dengan imbal balik yang sudah ditentukan. Seperti halnya pertanian kontrak berbasis rumah tangga di mana pun, aturan ini menciptakan beban besar pada tenaga kerja seluruh anggota keluarga. Bersama dengan perempuan dan laki-laki dewasa, anak-anak dikerahkan secara luas, bukan hanya dalam kerja-kerja rumah tangga dan produksi subsisten, melainkan juga dalam perluasan sektor tanaman ekspor, seperti pada tanaman *indigo*, *cochineal* (sumber bahan pewarna), kopi, teh, kayu manis, tembakau dan tebu. Anak-anak tak jarang juga dikerahkan untuk menggantikan orang tua atau patron mereka dalam kewajiban kerja paksa (Elson, 1994). Di dalam kelompok orang-orang tak bertanah yang berpindah-pindah ke seluruh Jawa bersama keluarga mereka sebagai buruh musiman yang mengikuti musim panen berbagai tanaman, seluruh anggota keluarga baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak biasanya bekerja mendapatkan upah. Besarnya upah anak-anak umumnya setara dengan upah perempuan (sekitar 60-80 persen daripada upah laki-laki). Sudah menjadi praktik yang lazim bila para tuan tanah mempekerjakan anak-anak dari keluarga tak bertanah atau keluarga petani marginal sebagai pembantu yang tinggal serumah, dengan makanan dan pakaian sebagai imbal balik untuk tenaga mereka (Boomgaard, 1989, White, 1982; Elson, 1994).

Bila menyangkut kewajiban kerja paksa untuk desa dan negara, batasan antara "anak" dan "orang dewasa" umumnya berkisar pada usia 14 tahun. Namun tak sedikit anak laki-laki

dan perempuan di bawah usia itu yang sudah dinikahkan dan upaya untuk mendapatkan tenaga kerja anak-anak adalah salah satu alasannya. Tidak ada gambaran yang jelas apakah dan seberapa keterlibatan kerja mengancam kebutuhan anak-anak untuk bermain dan beristirahat. Hal ini karena saat itu hanya ada sejumlah kecil anak-anak yang bersekolah sehingga kerja menjadi sarana utama untuk mempelajari keterampilan hidup (*life skills*).

Cepatnya perluasan perkebunan skala besar pada akhir abad 19 membawa pola baru penggunaan tenaga kerja. Angkatan kerja utamanya berasal dari keluarga Jawa yang tak bertanah atau petani gurem, direkrut sebagai kuli kontrak di Sumatera atau kontrak kerja jangka pendek di Jawa. *Input* tenaga kerja dari kalangan anak-anak merupakan hal yang lazim, tetapi tidak selalu menjadi ciri yang esensial. Perusahaan lokal dan Eropa sama-sama mempekerjakan anak-anak dengan skala masif. Secara umum, jam kerja anak-anak dilaporkan sama panjangnya dengan jam kerja orang dewasa (kebanyakan antara 8-10 jam sehari), sementara upah anak-anak rata-rata adalah setengah upah laki-laki dewasa dan 65-75 persen dari upah perempuan dewasa. Di sektor kerajinan dan industri kecil di perdesaan, sudah merupakan kelaziman bila anak-anak bekerja sebagai pembantu usaha keluarga sekaligus pencari upah. Rendahnya upah di sektor ini—yang jauh lebih kecil daripada upah di sektor pertanian—berarti semua anggota keluarga termasuk anak-anak harus berpartisipasi dalam produksi agar pendapatan minimal keluarga untuk bertahan dapat tercapai. Namun di wilayah perkebunan, seperti Sumatera dan pulau-pulau lain, laporan Inspektorat Buruh tidak menyebutkan adanya pekerja anak (White, 2004).

Pandangan yang berlaku umum bahwa kerja merupakan bagian yang menyenangkan atau alamiah dalam kehidupan anak-anak bukanlah sesuatu yang mengejutkan mengingat pada awal abad 20 hanya 0,05 persen (atau satu di antara 200) anak-anak pribumi yang sempat bersekolah formal. Baru setelah diperkenalkannya “kebijakan etis” dan pendirian sekolah-sekolah desa secara bertahap mulai tahun 1907, penduduk desa di sebagian besar wilayah mempunyai harapan mengakses pendidikan. Namun, bahkan menjelang dasawarsa 1930-an, masih hanya sepertiga anak-anak pribumi yang sempat duduk di bangku sekolah dasar. Mereka mengikuti sekolah ini hanya selama tiga tahun dan hanya dalam tempo dua setengah jam per hari. Hal ini berarti kapasitas mereka untuk bekerja tidak banyak terpengaruh meski sekolah mungkin telah membatasi keterlibatan mereka dalam berbagai jenis pekerjaan penuh waktu yang jauh dari rumah.

## **2. Mengatur Penggunaan Tenaga Kerja Anak pada Akhir Masa Penjajahan**

Berbagai intervensi tentang penggunaan tenaga kerja anak pada akhir masa kolonial (mulai tahun 1920-an hingga seterusnya) menunjukkan absurditas perundang-undangan yang menetapkan batas usia minimum pekerja berdasarkan kepedulian Eropa tentang buruh anak di lingkungan pabrik. Dalam konteks ketika pendidikan belum diwajibkan, ketika kebanyakan anak tidak bersekolah (dan mereka yang bersekolah pun meninggalkan sekolah menjelang usia 10 tahun) dan hanya ada sebagian kecil anak yang dipekerjakan sebagai buruh pabrik, pemberlakuan standar Eropa jelas merupakan suatu kekeliruan.

Sebagai penanda tangan Perjanjian Versailles, pemerintah Belanda berkewajiban untuk menerapkan Konvensi ILO No. 5 (1919) di negaranya sendiri maupun di wilayah koloni-koloninya. Konvensi ILO yang asli menetapkan usia 14 tahun sebagai batas minimum usia pekerja industrial. Konvensi itu dimaksudkan hanya untuk diterapkan pada industri (dengan demikian mengabaikan sektor pertanian, perdagangan, dan jasa), yang menunjukkan kecenderungan Eropa dan Amerika Utara untuk mengasosiasikan persoalan buruh anak dengan pabrik dan industri perkotaan.

Ketika itu, *Kantoor van Arbeid* (Dinas Ketenagakerjaan pemerintah kolonial) menyebarkan angket ke berbagai departemen, pejabat wilayah, dan asosiasi pengusaha tanaman ekspor penting tentang kemungkinan penerapan Konvensi ILO tersebut dalam bentuk sebuah Ordonansi. Asosiasi Pemilik Perkebunan Tebu telah mengambil aksi mendahului ordonansi baru itu dengan melarang penggunaan tenaga kerja anak-anak di bawah usia 12 tahun di pabrik-pabrik gula. Pada kenyataannya, industri gula sebenarnya menggunakan tenaga kerja anak-anak secara ekstensif, tetapi tidak di dalam pabriknya (yang diatur dalam konvensi). Anak-anak itu lebih banyak dipekerjakan di tanah terbuka (yang tidak diatur oleh konvensi), untuk melakukan pemupukan, penanaman, penyiraman, dan pemangkasan gulma. Setahun setelah Ordonansi baru, asosiasi 138 pabrik gula melaporkan penggunaan tenaga kerja "setengah dewasa" sejumlah 14,4 juta hari kerja, setara dengan 23 persen dari total penggunaan tenaga kerja upahan.

Di daerah penghasil tembakau Besuki (Jawa Timur) terdapat sekitar 5.000 pekerja anak, hampir seluruhnya perempuan. Mereka bekerja mulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 5 atau 5.30 sore di bagian pengeringan-pengepakan (sebagian besar

di bagian yang disebut terakhir), memikul bundelan daun tembakau dan menyerahkannya ke perempuan penyortir dan pengepak, serta membawa bundelan tembakau terpilih untuk ditimbang dan dipak. Keberatan industri tembakau terhadap Ordonansi baru mendapat tanggapan dengan dirumuskannya pendefinisian kembali "tempat kerja yang tertutup" sehingga tidak meliputi gudang-gudang pengeringan yang ditetapkan sebagai "tempat kerja terbuka" karena tidak berdinding rapat. Walhasil, bagian produksi ekspor yang banyak mempekerjakan buruh anak (pekerjaan di ladang perkebunan dan gudang pengeringan) dibiarkan tak tersentuh regulasi.

Selain itu, juga dilakukan pendefinisian kembali atas pengertian "waktu malam" yang semula disebutkan dalam Konvensi sebagai "masa istirahat selama 11 jam berturut-turut, termasuk waktu antara pukul 10 malam dan 5 pagi" menjadi masa istirahat selama 7 jam antara pukul 10 malam dan 5 pagi. Definisi "anak" itu sendiri ditafsirkan ulang dengan menurunkan usia minimum dari yang semula 14 menjadi 12 tahun kendati pada saat bersamaan di negeri Belanda. Usia minimum baru saja dinaikkan dari 12 menjadi 14 tahun sesuai dengan Konvensi ILO Tahun 1919. Redefinisi itu tidak dibarengi dengan usaha untuk mengubah fokus industrial yang ada dalam Konvensi agar sesuai dengan kondisi Hindia Belanda yang didominasi oleh ekonomi pertanian. Dengan demikian, Ordonansi baru (yang akhirnya disetujui tahun 1925) jelas tidak dimaksudkan untuk menjauhkan anak-anak dari dunia kerja, dari produksi pertanian, atau bahkan dari mencari pendapatan, dan tentu saja tidak untuk mendorong anak-anak masuk sekolah—hal yang jarang disitir dalam perdebatan dan diskusi masa itu—tetapi semata-mata untuk mengeksklusi mereka dari dunia "industri" dan *agro-processing* formal berskala besar di gedung-gedung tertutup.

Tahun 1930-an, Kantor Perburuhan sangat aktif menelusuri dan menindak pelanggaran Ordonansi baru. Usaha-usaha yang paling sering ditindak adalah (urut mulai dari yang paling tinggi frekuensinya) usaha batik, pengolahan dan penyortiran tembakau, pengolahan kapok, pemintalan katun, penggilingan padi atau jagung, pengolahan teh, penyortiran kacang tanah, pembuatan tapioka, pengolahan kopi, dan sejumlah kasus kecil lainnya di usaha pembuatan roti, penyamakan kulit, produksi barang-barang tembaga, obat nyamuk, keramik lantai, kembang api, kaleng, pengeringan kopra, percetakan, pabrik kaca, penganyaman topi pandan, pembuatan kerupuk, minyak goreng, kertas rokok, dan pengolahan tahu (White, 2004).

Di perusahaan-perusahaan perkebunan di luar Jawa, penggunaan tenaga kerja anak dilaporkan terbatas pada kerja pertanian dan perkebunan yang ringan. Itu pun hanya selama beberapa jam saja, seperti memetik ulat dan mengambil benih. Serupa dengan itu, di perusahaan-perusahaan tembakau, anak-anak dipekerjakan untuk menggantung daun tembakau di gubuk-gubuk pengeringan. Namun kita tidak boleh asal mengasumsikan bahwa buruh anak merupakan komponen penting bagi semua perusahaan industri dan pertanian yang bersifat padat-karya. Di kebanyakan kabupaten di Jawa Barat misalnya, laporan rinci Kantor Ketenagakerjaan tentang industri pengelintingan rokok tidak menemukan buruh anak di bawah usia 12 tahun.

Ordonansi tahun 1925 terus diberlakukan tanpa perubahan selama lebih dari 20 tahun. Akhir tahun 1940-an, berbagai perkembangan dalam perundang-undangan perburuhan Indonesia merdeka menciptakan keaburan tentang status legal buruh anak. Sebagian besar pengamat sepakat bahwa secara formal Ordonansi 1925 dengan beberapa perubahannya merupakan regulasi yang masih terus berlaku di masa Indonesia

merdeka hingga diperkenalkannya UU Perburuhan yang baru tahun 1987 (Bessell, 1999). Namun masalah ini lebih bersifat akademis karena tak ada satu kasus pelanggaran pun yang ditindaklanjuti setelah masa kemerdekaan.

### **3. Anak yang Bekerja dan Pendidikan di Masa Indonesia Merdeka**

Selama lima puluh tahun terakhir sejak kemerdekaan, kehidupan anak-anak Indonesia telah banyak berubah. "Anak" sendiri telah mengalami perluasan makna dan pendefinisian ulang melalui kombinasi meningkatnya usia menikah, penyebaran pendidikan dasar dan menengah secara cepat, dan dampak runtutannya berupa perubahan dalam pola keterlibatan kebanyakan anak dalam pekerjaan, baik laki-laki maupun perempuan. Semua kecenderungan ini berakibat penundaan saat berakhirnya masa anak (*prolongation of childhood*). Selama tiga dasawarsa pertama Indonesia merdeka, persoalan pekerja anak tidak banyak mendapat perhatian dari pemerintah atau gerakan buruh kendati muncul berbagai laporan sporadik di media. Tak ada ikhtiar untuk memperjelas keaburan dalam hukum terkait dengan penggunaan tenaga kerja anak dan tak ada majikan yang ditindak karena mempekerjakan anak di bawah umur.

Saat itu, upaya lebih banyak diarahkan untuk pembukaan akses secara cepat pada pendidikan dasar dan menengah. Pertumbuhan yang dramatis dalam hal akses pada pendidikan menunjukkan menjelang pertengahan dasawarsa 1980-an, bahkan sebelum diperkenalkannya wajib belajar pada tahun 1984, lebih dari 90 persen anak laki-laki dan perempuan berusia 7-12 tahun, serta hampir 70 persen anak perempuan dan 70 persen lebih anak laki-laki berusia 13-15 tahun, sudah

bersekolah. Menjelang akhir abad 20, tingkat partisipasi sekolah meningkat sampai 96 persen pada kelompok usia 7-12 tahun, dan 79 persen pada usia 13-15 tahun (Oey-Gardiner, 2000).

Dengan demikian, mayoritas anak-anak Indonesia masa kini yang bekerja merupakan anak-anak sekolah yang terlibat dalam pekerjaan paruh waktu. Partisipasi dalam sekolah, meski hanya menyita 4-5 jam per hari pada 6 tahun pertama sekolah, dengan sendirinya membatasi jenis-jenis pekerjaan yang tersedia untuk anak-anak dan tentu saja mengubah keterlibatan dalam aktivitas kerja menjadi paruh waktu saja (White & Tjandraningsih, 1998). Contoh yang baik diberikan oleh industri tembakau Jawa Timur. Perusahaan tembakau masa kini masih mempekerjakan buruh anak, tetapi semua anak itu mengenyam pendidikan sekolah paling tidak selama beberapa tahun. Kebanyakan mereka, terutama anak perempuan, mulai bekerja di gubuk pengeringan dan penyortiran sebelum menginjak usia 12 tahun. Namun mayoritas mereka menggabungkan pekerjaan ini dengan sekolah, bekerja 4 jam sehari atau kurang pada hari-hari sekolah. Berbeda tajam dengan masa sebelumnya, kebanyakan pekerja anak umumnya mengklaim upah yang mereka dapatkan untuk diri mereka sendiri meski sebagian di antara mereka memberikan sebagian atau seluruh pendapatan mereka ke orang tua (Tjandraningsih & Anarita, 2002).

### **Penutup: Prinsip untuk Mengatasi Persoalan Pekerja Anak Indonesia**

Seperti yang telah kita simak di bagian awal bab ini, penelitian ilmu sosial tentang pekerja anak mendukung pandangan yang berimbang tentang kedudukan kerja di dalam kehidupan anak-anak dan remaja, tak semua dianggap berbahaya atau tidak

sesuai dengan upaya menuju pendudukan yang berkualitas. Anak-anak sendiri cenderung mengutarakan pandangan ini secara gamblang. Tantangan terhadap pandangan konvensional yang memandang pekerja anak sebagai "korban pasif" juga disuarakan oleh para pekerja anak yang terorganisasi, suatu fenomena yang baru terdengar belakangan ini, yang mengulas kejelasan posisi kebijakan di berbagai pertemuan nasional atau internasional yang mereka selenggarakan sendiri ataupun yang diselenggarakan oleh orang-orang dewasa. Dalam gagasan mereka tentang masa anak-anak yang "normal" dan layak, mereka berpendapat selain hak atas pendidikan yang baik dan perlindungan dari eksploitasi, anak-anak juga berhak untuk bekerja dan memperoleh uang jika mereka menginginkannya atau memerlukannya (Invernezzi & Milne, 2002; Miljeteig, 2005; Swift, 1999; Liebel, 2004). Pandangan serupa juga menjadi bagian dari masa anak-anak yang "normal" di berbagai negara maju, seperti Belanda, Inggris, dan USA, sekalipun kenyataan ini diabaikan dalam model normatif anak-anak Barat. Oleh karenanya, persoalan "buruh anak" (perlu) didefinisikan ulang bukan sebagai persoalan *keterlibatan* anak-anak semata-mata dalam dunia kerja atau pasar tenaga kerja, tetapi sebagai persoalan *penyalahgunaan* kapasitas anak untuk bekerja. Hal ini seharusnya menjadi prinsip penting yang mendasari intervensi dari pihak pemerintah maupun aktivis. Beberapa implikasi dari prinsip ini terhadap kebijakan dijelaskan sebagai berikut.

1. *Di dalam pendidikan: menyediakan sekolah yang berkualitas dan gratis (dan didukung oleh beasiswa bersasaran), setidaknya hingga usia 15 tahun, ketika anak-anak dapat belajar kompetensi dan keterampilan hidup yang berguna dengan cara-cara yang menyenangkan dan aman.* Tentu

saja, hal ini akan memerlukan banyak uang dan juga sebuah generasi baru para pengajar yang berdedikasi untuk menciptakan “pembelajaran yang menyenangkan” (joyful learning). Sekolah harus menjadi tempat anak-anak ingin berada! Agar segera dapat mewujudkan hal ini, kita harus lebih memperlakukan pendidikan lebih sebagai hak untuk anak (sebagaimana tertulis dalam CRC)—sesuatu yang dapat diklaim saat ini, untuk anak-anak sekarang—ketimbang sebagai “kebutuhan” atau “tujuan” (sebagaimana tercantum dalam Program Education for All dan Millennium Development Goals-nya PBB).

2. *Dalam perundang-undangan dan peraturan tentang pekerja anak: pikirkan ulang tentang sasarannya: bukan semata-mata ‘kerja anak’ atau ‘buru anak’, melainkan*

- a) semua pekerjaan yang membahayakan, dan
- b) semua pekerjaan yang mencegah anak berpartisipasi dalam sekolah

Di sini, kita dapat kembali mengikuti CRC (tentang hak atas perlindungan dari eksploitasi dan pekerjaan yang membahayakan dan hak atas pendidikan). CRC plus konvensi ILO No. 182 (1999) tentang Bentuk-bentuk Kerja Anak yang Paling Buruk (*Worst forms of Child Labour*) memberikan dasar yang cukup dan legitimasi untuk pengambilan tindakan.

3. *Tidak perlu terlalu memusubi kerja anak yang bersifat paruh waktu (termasuk kerja berupah) yang dilakukan anak-anak sekolah.* Jika anak-anak ingin berkerja, atau perlu bekerja untuk memperoleh uang, mereka akan tetap melakukannya tak peduli apa pun isi peraturan dan perundangan. Oleh karenanya, lebih baik mengizinkan melakukan pekerjaan yang aman dan tidak mengganggu sekolah. Jika beberapa sekolah

di Inggris, bahkan turut membantu anak-anak mencari pekerjaan yang aman dan tidak mengganggu sekolah—kenapa hal ini tidak dipraktikkan juga di Indonesia?

4. *Libatkan komunitas, anak-anak dan mantan anak (remaja), wartawan, dan masyarakat sipil dalam proses identifikasi, publikasi, dan tindakan memerangi majikan dan situasi saat anak-anak dikaryakan dalam pekerjaan yang berbahaya (worst forms) dan ikutilah Konvensi ILO 182 dalam penggunaan hukum pidana dan sanksi hukum.* Sejumlah petugas Depnaker dan polisi tidak dapat melakukan pekerjaan ini sendirian.

5. *Dalam hal intervensi: berkonsultasilah dengan anak-anak sebelum mengambil langkah intervensi dalam hidup mereka.*

Dalam semua situasi ketika anak-anak ditemukan terlibat dalam pekerjaan yang (oleh pihak dewasa dianggap) berbahaya, pastikanlah dulu bahwa (a) ada alternatif yang lebih baik dan (b) anak-anak memberikan persetujuan pada intervensi tersebut sebelum diambilnya tindakan untuk ‘menyelamatkan’ mereka.

6. *Berilah kesempatan dan doronglah anak-anak untuk bergabung dengan serikat pekerja dan organisasi politik lainnya, dan/atau untuk membentuk organisasi mereka sendiri.*

Sekali lagi, di sini kita dapat mengikuti CRC tentang hak anak untuk mengutarakan pandangan mereka dan hak mereka untuk didengar dan membentuk asosiasi.

Menurut saya, tenaga dan sumber daya kita lebih baik digunakan untuk menjalankan ikhtiar-ikhtiar tersebut daripada berkampanye mendorong seluruh negara yang turut dalam Konvensi ILO 138 yang melarang keterlibatan anak dalam “semua bentuk kerja”. Jika semua bentuk pekerjaan yang berbahaya

telah dihapuskan (sesuai dengan Konvensi ILO 182) dan semua anak telah menikmati hak mereka atas pendidikan (CRC), apa lagi yang perlu dihapuskan?

### Daftar Pustaka dan Bacaan Lebih Lanjut

- Alanen, Leena and Berry Mayall, (eds.). 2001. *Conceptualizing Child-Adult Relations*. London: Routledge/Falmer.
- Boomgaard, Peter. 1989. *Children of the Colonial State: Population Growth and Economic Development in Java 1795-1880*. Amsterdam: Free University Press.
- Bourdillon, Michael. 2006a. "Children and Work: a Review of Current Literature and Debates," *Development and Change* 37(6): 1201-26.
- Bourdillon, Michael. 2006b. *Child Domestic Workers in Zimbabwe*. Harare: Weaver Press.
- Boyden, Jo. 1997. "Childhood and the Policy Makers: a Comparative Perspective on the Globalization of Childhood," in *Constructing and Reconstructing Childhood*. 2nd ed. London: Routledge/Falmer.
- Camacho, Agnes Z. 1999. "Family, child labour and migration: child domestic workers in Metro Manila," in *Childhood* 6(1): 57-73.
- Elson, Robert. 1994. *Village Java under the Cultivation System 1830-1870*. Sydney: Allen & Unwin.
- Garet, Bernard. 2000. "Apprenticeship in France: A Parallel Case in Industrialized Society," in Bernard Schlemmer (ed.), *The Exploited Child*. London: Zed Books, pp. 248-60.
- Grier, Beverly C. 2006. *Invisible Hands: Child Labor and the State in Colonial Zimbabwe*. Portsmouth, NH: Heinemann.
- Howieson, Cathy; Jim McKechnie and Sheila. Semple, 2006. *The nature and implications of the part-time employment of*

*secondary school pupils*. Edinburgh: Scottish Executive Social Research.

- Hungerland, Beatrice, et.al. (eds.). 2007. *Working to be Someone: Child Focused Research and Practice with Working Children*. London & Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
- Iversen, Vegard. 2002. "Autonomy in Child Labour Migrants" *World Development* 30(5): 817-34.
- Jacquemin, Mélanie Y. 2004. "Children's Domestic Work in Abidjan, Côte d'Ivoire: The Petites Bonnes Have the Floor," *Childhood* 11(3): 383-397.
- James, Allison and Adrian L. James. 2004. *Constructing Childhood: Theory, Policy and Social Practice*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- James, Allison and Alan Prout, (eds.). 1997. *Constructing and Reconstructing Childhood*. 2nd ed. London: Routledge/Falmer.
- Liebel, Manfred. 2004. *A Will of Their Own: Cross-cultural Perspectives on Working Children*. London and New York: Zed Books.
- Lieten, Kristoffel and Ben White White, (eds.). 2001. *Child Labour: Policy Options*. Amsterdam: Aksant.
- Marguerat, Yves. 2000. "The Exploitation of Apprentices in Togo," in Bernard Schlemmer (ed.) *The Exploited Child*. London: Zed Books, pp. 239-47.
- Mayall, Berry. 2001. "The Sociology of Childhood in Relation to Children's Rights", in *The International Journal of Children's Rights* (8): 243-59.
- McKechnie, Jim and Sandy Hobbs. 2001. "Work and Education: Are They Compatible for Children and Adolescents?", in P. Mizen, C. Pole and A. Bolton (eds.) *Hidden Hands: International Perspectives on Children's Work and Labour*. London: Routledge/Falmer, pp. 9-23.

- Miljeteig, Per; Ben White, and Williams Christopher (eds.). 1999. *Understanding Child Labour*. Special Issue, *Childhood* (6):1.
- Montgomery, Heather. 2001. *Modern Babylon? Prostituting Children in Thailand*. New York: Berghahn Books.
- Moore, Karen. 1999. "Supporting Children in Their Working Lives: Obstacles and Opportunities Within the International Policy Environment", *Journal of International Development* (12): 531-48.
- Morice, Alain. 1982. "Underpaid Child Labour and Social Reproduction: Apprenticeship in Kaolack, Senegal," *Development and Change* 13(4): 515-26.
- Mortimer, Jeylan T. 2003. *Working and Growing Up in America*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Myers, William E. 2001a. "Valuing Diverse Approaches to Child Labour," in Kristoffel Lieten and Ben White (eds.). *Child Labour: Policy Options*. Amsterdam: Akzant, pp. 27-48.
- Myers, William E. 2001b. "Can Children's Education and Work be Reconciled?" *International Journal of Education Policy, Research, and Practice* 2(3): 307-30.
- Nieuwenhuys, Olga. 1996. "The Paradox of Child Labor and Anthropology" in *Annual Review of Anthropology* (25): 237-51.
- Nieuwenhuys, Olga. 1999. "The Paradox of the Competent Child and the Global Childhood Agenda," in R. Fardon, W. van Binsbergen and R. van Dijk (eds.) *Modernity on a Shoestring: Dimensions of Globalization, Consumption and Development in Africa and Beyond*. Leiden & London: EIDOS, pp. 33-48.
- O'Connell Davidson, Julia. 2005. *Children in the Global Sex Trade*. Cambridge: Polity Press.
- Oey-Gardiner, M. 2000. "Schooling in a Decentralized Indonesia: New Approaches to Access and Decision-making," in *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 36(3): 127-134.

- Qvortrup, Jens. 1995. "From Useful to Useful: The Historical Continuity of Children's Constructive Participation," *Sociological Studies of Childhood* (7): 49-76.
- Qvortrup, Jens. 2001. "School-work, Paid Work and the Changing Obligations of Childhood" in P. Mizen, C. Pole and A. Bolton (eds.) *Hidden Hands: International Perspectives on Children's Work and Labour*. London: Routledge/Falmer, pp. 91-107.
- Reynolds, Pamela. 1991. *Dance Civet Cat: Child Labour in the Zambesi Valley*. London: Zed Books.
- Robson, Elsbeth N. A. 2000. "Young Carers in Southern Africa: Exploring Stories from Zimbabwean Secondary School Students." In S. Holloway and G. Valentine (eds.) *Children's Geographies: Playing, Living, Learning*. London & New York: Routledge, pp. 174-193.
- Rogoff, Barbara. 2003. *The Cultural Nature of Human Development*. Oxford: University Press.
- Schlemmer, Bernard (ed.). 2000. *The Exploited Child*. London: Zed Books.
- Stearns, Peter. 2006. *Childhood in World History*. New York and London: Routledge.
- Thorsen, Dorte. 2006. "Child Migrants in Transit: Strategies to Assert New Identities in Rural Burkina Faso," in C. Christiansen, M. Utas and H.E. Vigh (eds.) *Navigating Youth, Generating Adulthood: Social Becoming in an African Context*. Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet, pp. 88-114.
- Tjandraningsih, Indrasari dan Popon Anarita. 2002. *Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau (Child workers in tobacco plantations)*. Bandung: AKATIGA.
- White, Ben (ed.). 1982. *Child Workers. Special Issue, Development and Change* 13:4.
- White, Ben and Indrasari Tjandraningsih. 1988. *Child Workers in Indonesia*. Bandung: In collaboration AKATIGA and International Working Group on Child Labour.



- White, Ben. 1982. "Child Labour and Population Growth in Rural Asia", *Development and Change* 13(4): 587-610.
- White, Ben. 1994. "Children, Work and 'Child Labour'; Changing Responses to the Employment of Children," *Development and Change* 25(4): 848-878.
- White, Ben. 2004. "Constructing Child Labour: Attitudes to Juvenile work in Indonesia, 1900-2000," in R. Elmhirst and R. Saptari (eds), *Labour in Southeast Asia: Local Processes in a Globalised World*. London: Routledge, pp. 77-105.
- White, Ben. T.t. "Globalisation and the child labour problem," *Journal of International Development* 8 (6): 829-839.
- Woodhead, Martin. 1999. "Combating Child Labour: Listen to What the Children Say," *Childhood* 6(1): 27-49.
- Woodhead, Martin. 2001. "The Value of Work and School: a Study of Working Children's Perspectives," in Kristoffel Lieten and Ben White. *Child Labour: Policy Options..* Amsterdam: Aksant, pp. 103-16.
- Zelizer, Viviana. 1985. *Pricing the Priceless Child: The Changing Social Value of Children*. New York: Basic Books.